



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

7. Renstra Dinas Sosial;
 8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kapanewon, terdiri atas :
1. Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Renstra Kapanewon Piyungan;

- 15. Renstra Kapanewon Sewon;
- 16. Renstra Kapanewon Kasihan;
- 17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD) dan berpedoman kepada RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra PD sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

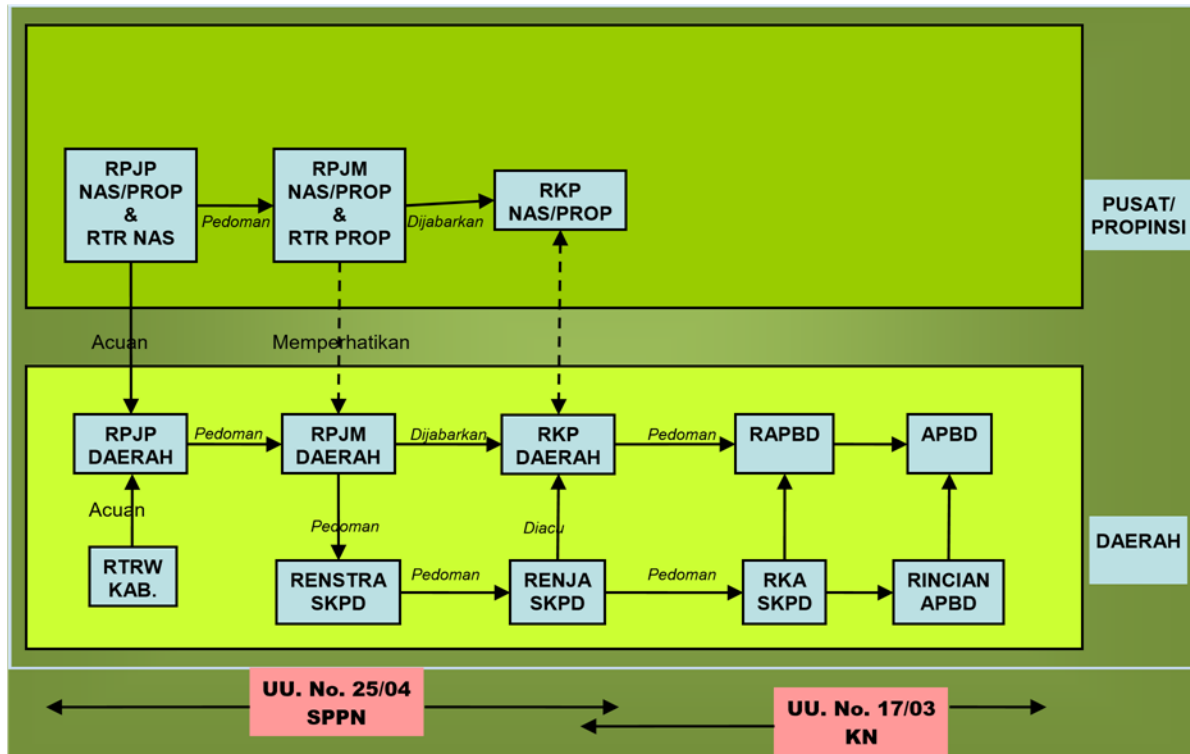
Dengan adanya kewajiban dari setiap PD untuk menyusun Renstra PD, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKPAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja BPKPAD.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra BPKPAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Gambar diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD, kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renstra PD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung program Bupati/Wakil Bupati.

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yaitu dengan merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** diubah atau diganti menjadi **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPKPAD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1950);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 seri D Nomor 9);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 160);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPKPAD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Gambaran rincian fungsi BPKPAD sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan administratif keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta asset;
- n. pengoordinasian penetapan, pemasangan dan pembongkaran reklame;
- o. penyusunan standarisasi barang dan standarisasi harga barang dan jasa;
- p. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- q. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- r. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, humas, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Badan;

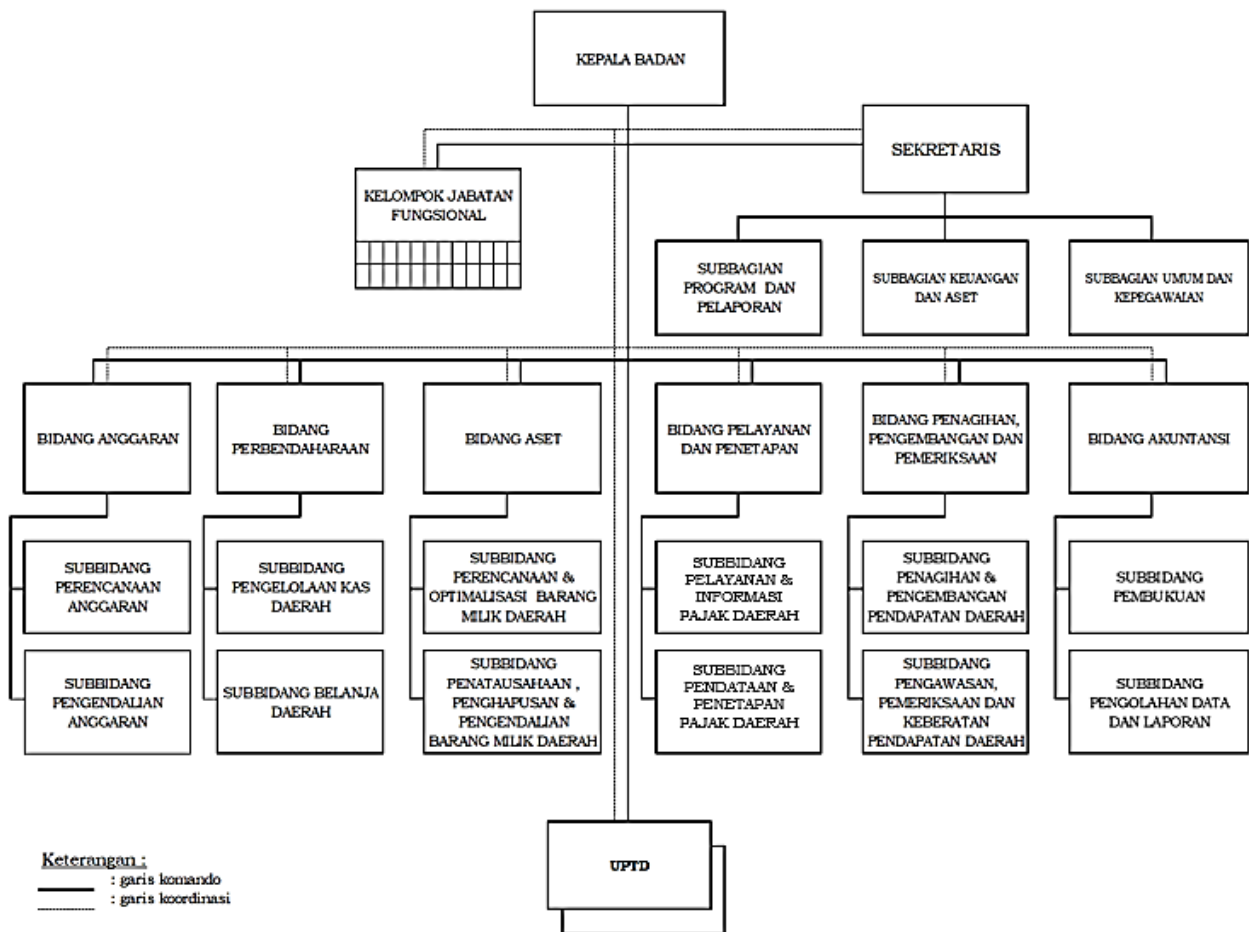
- t. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- u. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BPKPAD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul, dan bertekad menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu, BPKPAD juga sebagai penentu dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKPAD Kabupaten Bantul mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Aset;
6. Bidang Pelayanan dan Penetapan;
7. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan;
8. Bidang Akuntansi;
9. UPTD;
10. Jabatan Fungsional.

Secara lengkap struktur organisasi Badan keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam gambar 2.1



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat secara umum mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- h. pelaksanaan penatausahaan Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;

- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pembinaan dan fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Badan;
- o. pelaksanaan penatausahaan belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)
- p. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- t. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Anggaran

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian anggaran;
- c. perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;

- f. pengoordinasian , penyusunan dan verifikasi RKA, Perubahan RKA, DPA dan perubahan DPA SKPD;
- g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. pengoordinasian dan penerbitan/pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA/DPPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- i. penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan;
- k. pengoordinasian, pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;
- l. pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Anggaran;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

3. Bidang Perbendaharaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian kas daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan gaji dan tunjangan ASN;
- f. pengoordinasian penerbitan Surat perintah pencairan Dana (SP2D);
- g. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah;

- h. pengoordinasian, fasilitasi, asistensi serta sinkronisasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - i. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas Daerah, pelaksana analisa pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas daerah;
 - k. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
 - l. pengoordinasian pelaporan Rekapitulasi transaksi harian belanja daerah (RTH) dan daftar transaksi harian belanja daerah (DTH) atas belanja daerah yang pemungutan/pemotongan dan atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh bendahara pengeluaran OPD;
 - m. pelaksana rekonsiliasi antara pemerintah Daerah, KPPN, dan kantor pelayanan pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan Negara;
 - n. pengoordinasian , pelaksanaan pemungutan/pemotongan, penyetoran dan pelaporan perhitungan pihak ketiga;
 - o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perbendaharaan;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang perbendaharaan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Belanja Daerah.

4. Bidang Aset

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Aset mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan program pengelolaan barang milik daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan barang barang milik daerah;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- g. penyusunan standar harga dan barang;
- h. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan;
- i. pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
- j. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian pemanfaatan barang milik daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
- o. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
- p. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- q. penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
- r. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Aset;
- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang; Aset ; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah;
- b. Subbidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.

5. Bidang Pelayanan dan Penetapan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. pengolahan dan pemeliharaan data dan informasi pajak daerah;
- j. pengembangan teknologi informasi pajak daerah;
- k. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- l. pelaksanaan penghitungan, penetapan dan penilaian pajak daerah;
- m. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
- n. pembinaan teknis bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan terkait pendapatan daerah;
- p. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapan, data dan informasi serta pelayanan;
- r. pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
- b. Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

6. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pemeriksaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis terkait penagihan, pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
- e. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan bagi wajib pajak;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi daerah dan retribusi daerah;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak, piutang pajak, pengurangan/keringanan/pembebasan, keberatan dan banding, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan tindak lanjut surat pengurangan dan /atau keringanan dan /atau pembebasan, keberatan dan banding;
- j. pengoordinasian pemeriksaan, pengendalian operasional, dan penindakan di bidang pajak daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan dan /atau keringanan, keberatan dan banding serta evaluasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksian terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksanaan dan Keberatan Pendapatan Daerah.

7. Bidang Akuntansi

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

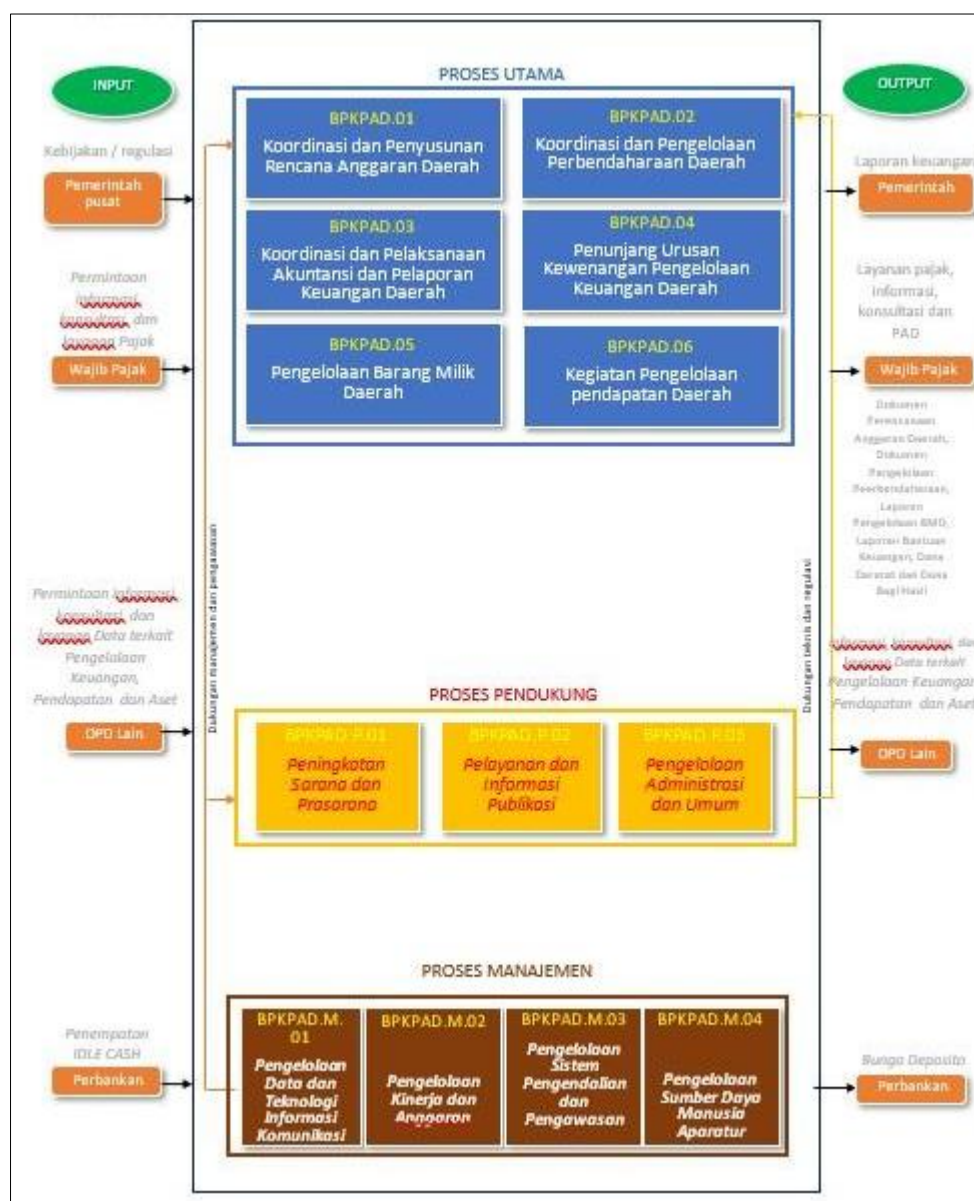
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi;
- b. perumusan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pengoordinasian laporan keuangan SKPD, SKPKD dan Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian dan pembinaan penyusunan neraca SKPD;
- h. penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;
- i. penyelenggaraan akuntansi keuangan selain kas;
- j. penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. pembinaan dan pengesahan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- n. penyajian laporan keuangan daerah;
- o. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- p. penyusunan laporan semesteran;
- q. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- r. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- s. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- t. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Akuntansi;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Akuntansi; dan

- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Pembukuan; dan
- b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan.

BPKPAD merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan otonomi daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pelaksanaan urusan tersebut diwujudkan dalam pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Untuk menjawab telaah tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah dapat dijelaskan melalui bagan berikut;



Gambar 2.2

Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tugas, fungsi dan struktur organisasi yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Bantul sudah sesuai dan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 2.2 BPKPAD terdapat enam kelompok proses utama berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPAD, enam kelompok kegiatan tersebut berupa;

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan;
6. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan ketugasan BPKPAD, terdapat dukungan dari Proses Manajemen dan Proses Pendukung. Untuk Proses Pendukung terdiri dari pelaksanaan Program Kegiatan Kesekretariatan meliputi tiga aspek, yaitu (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana, (2) Pelayanan dan Informasi Publikasi, (3) Pengelolaan Administrasi dan Umum. Sedangkan untuk Proses Manajemen terdiri dari empat aspek, meliputi : (1) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, (2) Pengelolaan Kinerja dan Anggaran, (3) Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan, dan (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi umum Sumber Daya Manusia/Aparatur

Jumlah seluruh pegawai sebanyak 148 orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	106	71,62
2.	Non ASN	42	28,38
	JUMLAH	148	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 71,62% jumlah pegawai adalah ASN dan 28,38% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 formasi jabatan struktural terdiri dari eselon II, III, dan IV sebanyak 26 orang

(24,53%), jabatan fungsional sebanyak 10 orang (9,43%), dan sisanya 70 orang (66,04%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,94
2.	Eselon III	7	6,61
3.	Eselon IV	18	16,98
4.	Fungsional	10	9,43
5.	Fungsional umum	70	66,04
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

Dari 106 orang jumlah pegawai yang berstatus ASN, terdapat 5,66% pegawai golongan IV, 70,75% pegawai golongan III, 21,70% pegawai golongan II dan sebanyak 1,89% pegawai golongan I.

Tabel 2.3

Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	6	5,66
2.	Golongan III	75	70,75
3.	Golongan II	23	21,70
4.	Golongan I	2	1,89
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTP/ sederajat dengan komposisi 2,83% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi 12,26%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase 34,91%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3/D-4 dengan komposisi sebesar 15,09%, pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat 34,91%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan pendidikan

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Pasca Sarjana (S-2)	13	12,26
2.	Sarjana (S-1)	37	34,91
3.	Diploma (D-3/D-4)	16	15,09
4.	SLTA/ sederajat	37	34,91
5.	SLTP/ sederajat	3	2,83
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 45,28% pegawai berjenis kelamin perempuan dan sisanya 54,72% pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	48	45,28
2.	Laki-laki	58	54,72
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.

Berdasarkan jenis jabatan, kondisi pegawai per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKPAD memerlukan dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana. Jika mengacu Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, masih terdapat kekurangan pegawai, baik dari segi jumlah pegawai di suatu jabatan maupun jenis jabatan yang belum ada di BKAD.

Kebutuhan pegawai berdasarkan pencermatan Peraturan Bupati tersebut pada tanggal 17 Juni 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai Peraturan Bupati 147 Tahun 2018

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
1.	Sekretariat			
	Sekretaris	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	2 orang	1 orang
	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengemudi	1 orang	0 orang	1 orang
	Pramu Bakti	3 orang	3 orang	0 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Tatalaksana	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bagian Program			
	Kepala Sub Bagian Program	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data	3 orang	1 orang	2 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	1 orang	0 orang

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset			
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	Bendahara	3 orang	2 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang	0 orang
2.	Bidang Pelayanan dan Penetapan			
	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pelayanan			
	Kepala Sub Bidang Pelayanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak/Retribusi	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analisis Pendapatan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan			
	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	3 orang	
3.	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan			
	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Penagihan			
	Kepala Sub Bidang Penagihan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	0 orang	3 orang
	Pengadministrasi Keuangan	3 orang	1 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Pajak	20 orang	18 orang	2 orang
	Analisis Penagihan Pajak	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah			
	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data dan Potensi Pajak	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Pendapatan Daerah	3 orang	0 orang	3 orang
	c. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan			
	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	4 orang	(2) orang
	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pemeriksaan Pajak	3 orang	1 orang	2 orang
4.	Bidang Anggaran			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Bidang Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analisis Perencanaan Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
	b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
5.	Bidang Perbendaharaan			
	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang

	b. Sub Bidang Belanja Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	1 orang	4 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang
6.	Akuntansi			
	Kepala Bidang Akuntansi	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pembukuan			
	Kepala Sub Bidang Pembukuan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	1 orang	0 orang
7.	Bidang Aset			
	Kepala Bidang Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi			
	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
8.	Jabatan Fungsional Tertentu:			
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pranata Komputer Pertama	2 orang	2 orang	0 orang
	Pranata Komputer Muda	1 orang	0 orang	1 orang
	Pranata Komputer Pelaksana	3 orang	1 orang	2 orang
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	3 orang	5 orang	(2) orang
	Jumlah	195 orang	106 orang	89 orang

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati 147 Tahun 2018, diolah

Jika dilihat dari jenis-jenis disiplin ilmu yang ada, dapat disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah pegawai berdasarkan disiplin ilmu

No	Disiplin Ilmu	Jumlah
I.	PASCA SARJANA	
	Magister Manajemen (MM)	1
	Magister Sains Ekonomi (MSE)	1
	Magister Sains (M.Si)	4
	Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)	1
	Magister Administrasi Publik (M.AP)	2
	Magister Public Administrasion (M.P.A)	1
	Master of Accountancy (MAcc)	1
	Master of Arts (M.A)	1
	Masters of Economics of Development (M.Ec.Dev)	1
II.	SARJANA	
	Sarjana Ekonomi (SE)	27

No	Displin Ilmu	Jumlah
	Sarjana Akuntansi (SE.Ak / Ak)	1
	Sarjana Hukum (SH)	3
	Sarjana Administrasi Pemerintahan (S.AP)	1
	Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp)	2
	Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)	1
	Sarjana Teknik (S.T)	2
	Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.STP)	1
III.	DIPLOMA	15
IV.	SLTA/Sederajat	37
v.	SLTP/Sederajat	3
	JUMLAH	106

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa disiplin ilmu pegawai BPKPAD sangat variatif yang sangat mendukung dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah. Dari kondisi tersebut, disiplin ilmu yang masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi BPKPAD adalah sarjana akuntansi, penilai aset dan auditor pendapatan daerah. Dengan demikian, dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah semakin berkualitas.

2.2.2. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki BPKPAD Kabupaten Bantul untuk menunjang pelayanan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Berdasarkan KIB B

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	15	unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	62	unit
3	Sandaran Sepeda	1	unit
4	Screen motorized	1	unit
5	Sepeda	4	unit
6	AC	37	unit
7	Almari (arsip/kayu/kaca)	124	unit
8	Alat Ukur Laser	2	unit
9	Bracket	1	unit
10	Brankas	6	unit
11	Cabing	1	unit
12	Chairman unit	1	unit
13	Control And Power Supply	1	unit
14	Credensa Arsip	2	unit
15	Delegate unit	8	unit
16	Dingklik Panjang	3	unit
17	Dispenser	3	unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
18	Telepon/faximile/airphone	15	unit
19	Filling Cabinet	17	unit
20	Genset	2	unit
21	Gerenda	1	unit
22	GPS	2	unit
23	Handy talky	1	unit
24	Hardisk External	2	unit
25	Kettle	1	unit
26	Kipas Angin	3	unit
27	Komputer (PC/server/built up)	118	unit
28	PC unit	9	unit
29	Mini PC	13	unit
30	Lemari es	5	unit
31	Kursi	371	unit
32	Meja/kursi/sofa tamu	17	set
33	Laptop/note book	74	unit
34	Printer server/high speed	137	unit
35	Scanner	4	unit
36	Barcode Scanner	12	unit
37	Server	3	unit
38	Monitor	16	unit
39	LCD	7	unit
40	UPS	10	unit
41	Stabilizer	2	unit
42	Peralatan Jaringan	4	unit
43	Televisi	15	unit
44	Mega Phone	1	unit
45	Wireles	4	unit
46	Sound System	3	unit
47	Power Amplfier 120 W	1	unit
48	Speaker	2	unit
49	Pengeras Suara	3	unit
50	Sound Mobil	1	unit
51	Meja	167	unit
52	Rak Arsip (arsip/kayu/besi/server/dixon)	42	unit
53	Mebelair Mobil Pajak	3	unit
54	Mesin ketik	6	unit
55	NAS (Net Attached Storage)	2	unit
56	Penghisap Debu	2	unit
57	Perforator	3	unit
58	Water Meter	10	unit
59	Mesin Foto Copy	3	unit
60	Papan Nama Instansi	1	unit
61	Papan Visual/ ppn Nama/baliho	23	unit
62	Tablet/handphone	3	unit
63	Kamera	10	unit
64	Triport	2	unit
65	Gimbal	1	unit
66	Camcoder	1	unit
67	Lighting	1	unit

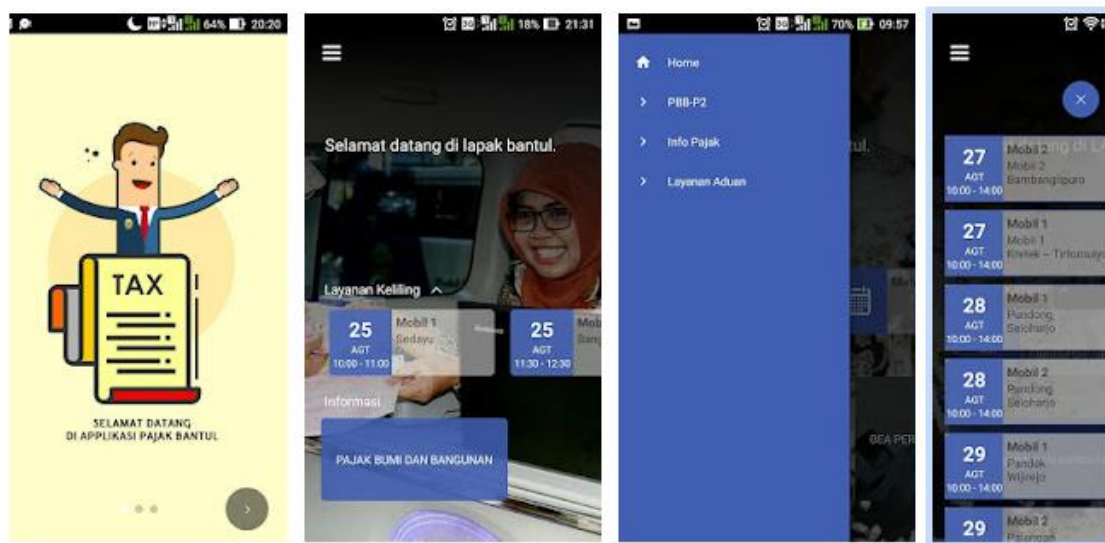
No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
68	Chiller	1	unit
69	Home Theater/ alat2 studio	1	unit
70	VM Ware v Sphere Essentials Kit	1	unit
71	Roll O pack	1	unit
72	Alat penghancur Kertas	1	unit
73	Loker 15 pintu	2	unit
74	Cash Box	5	unit
75	Coffee/ The warmer	3	unit
76	Gordyn	1	unit
77	Mesin hitung	2	unit
78	Modem	5	unit
79	Partisi/ Skat	2	unit
80	Mesin Antrian	1	unit
81	Anjungan Mandiri	1	unit
82	White Board	1	unit
83	Money detector	1	unit
84	My screen fast Foldable	2	unit
JUMLAH		1.459	

Sumber : Buku Inventaris BKAD per 31 Desember 2020, diolah.

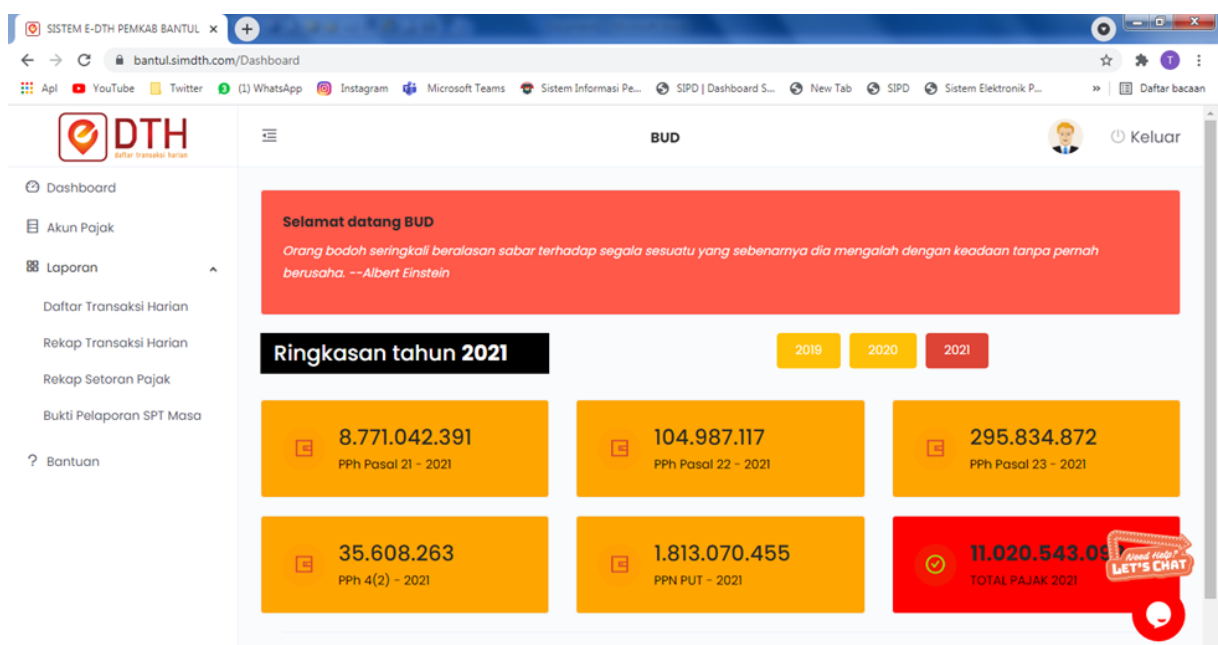
Dalam upaya meningkatkan tata kelola bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah, BPKPAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan daerah (SIDAT KEUDA), Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan daerah (SIMPATDA), Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak BANTUL), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), sep@kat.



Gambar 2.3 Aplikasi Sidat Keuda



Gambar 2.4 Aplikasi LAPak Bantul



Gambar 2.5 Aplikasi DTH RTH

SIKD Core

Monitoring Data Penyampaian Gaji PNSD


Tahun: 2018 Data Masuk: Dari 542 Pemda x : Data xml
 Provinsi: Provinsi DI Yogyakarta tampilkan p : File PDF

KODE	Nama Daerah	Bulan															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12.00	Provinsi DI Yogyakarta	x	p	x	p	x	p	x	p	x	p	x	p	x	p	x	p
12.01	Kab. Bantul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.02	Kab. Gunung Kidul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.03	Kab. Kulon Progo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.04	Kab. Sleman	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.05	Kota Yogyakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Copyright © 2014-2015 All rights reserved. Version 2.3.0

Gambar 2.6 Aplikasi SIKD

SIMAS Kabupaten Bantul



Administrator Login

E-Mail _____

Password _____

Ingatkan Saya

LOGIN >

Gambar 2.7 Aplikasi SIMAS

SIMPATDA V2.3 - BKAD Kab Bantul

Aplikasi | Proses Simpatda | Proses BPHTB | Perforasi | Admin

Rabu, 11 Juli 2018

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Bantul

LOGIN PENGGUNA >

USERNAME _____
 PASSWORD _____

Login | Tutup

SIMPATDA
Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Versi 2.3

Client: 10.128.34.28 Waktu Server: 11 Juli 2018, 09:45

Gambar 2.8 Aplikasi SIMPATDA

Gambar 2.9 Aplikasi Simpersada



Gambar 2.10 Aplikasi sepak@t



Gambar 2.11 Aplikasi SISMIOP

Periode	Kode Billing dan No Ref	NPWP	Subyek Pajak	Bidang Usaha	Kecamatan	Jml Nota	Jml Omset	Jml Bayar	Post	Status	Action
DESEMBER 2021	34.02.150.0001890.01		Hotel Blue Garden	Hotel	Kasihan	1	Rp. 0,00 (1 Nota)	Rp. 0,00	Post	Salah Lulus	Post, Cetak SPTPD
DESEMBER 2021	33.02.010.0001962.01		Edi Sutrisno Rm. Rocket Chicken Standakan	Restoran / Rumah Makan	Standakan	31	Rp. 0,00 (31 Nota)	Rp. 0,00	Post	Salah Lulus	Post, Cetak SPTPD
DESEMBER 2021	34.04.130.0002347.01		Arlendenowega Hotel Klot Eduhuve Ndalem Ayu	Hotel	Kasihan	0	Rp. 0,00 (0 Nota)	Rp. 0,00	Post	Salah Lulus	Post, Cetak SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.150.0000503.01		Veronika Sri C. Hotel Nitipuran	Hotel	Kasihan	8	Rp. 0,00 (8 Nota)	Rp. 0,00	Post	Salah Lulus	Post, Cetak SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.130.0000195.01		Andrian Jati Prasetya Rm. Gombog Resto	Restoran / Rumah Makan	Banguntapan	0	Rp. 0,00 (0 Nota)	Rp. 0,00	Post	Salah Lulus	Post, Cetak SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.140.0001893.01		DuLit Hotel Pelem Sewu Cottage	Hotel	Sewon	0	Rp. 0,00 (0 Nota)	Rp. 0,00	Post	Salah Lulus	Post, Cetak SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.150.0000397.01		Unit Agustini Rm. Pondok Gajah Resto	Restoran / Rumah Makan	Kasihan	0	Rp. 0,00 (0 Nota)	Rp. 0,00	Post	Salah Lulus	Post, Cetak SPTPD

Gambar 2.12 Aplikasi E-SPTPD

Tabel 2.9
Data Jaringan Komputer berdasarkan KIB D

No.	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Jaringan komputer	1	APBD 2010
2.	Jaringan komputer	1	APBD 2011
3.	Jaringan komputer	1	APBD 2012
	JUMLAH	3	

Sumber : KIB D BKAD per 31 Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BKPAD merupakan salah satu Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kinerja pelayanan selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, disajikan dalam Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indikator Sasaran																			
	Opini Pemeriksaan BPK	WTP = 1 WDP = 2 Tidak Wajar = 3 Tidak Menyatakan pendapat = 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	21	22	23	24	17	17	20,22	22,32	21,47	23,11	17,32	17	96,29	101,45	93,35	96,29	101,88	100
	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	Persen	18	17,5	18	19	16	16	20	28,15	22,31	22,89	18,46	16	111,11	160,86	123,94	120,47	115,38	100
	Persentase penyerapan belanja pemerintah	Persen	55	60	65	68	50	60	48	51	66,7	56,75	69	60	87,27	85	102,62	83,46	138	100
2.	Indikator Program																			
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD Kabupaten Bantul	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Perbup	2	2	2	2	2	-	3	2	2	2	1	-	150	100	100	100	50	-
	Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Persen	5	5	5	5	5	-	5	5	5	6,36	99,14	-	100	100	100	72,8	1728,80	-
	Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target	Persen	20	25	30	35	40	50	53	46	66,67	52,08	64,42	50	265	184	222,23	148,8	161,05	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase pemahaman bendahara tentang prosedur dan tatacara pengelolaan keuangan	Persen	-	80	-	-	-	-	-	76,19	-	-	-	-	-	95,24	-	-	-	-
	Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar	Persen	60	75	80	85	90	-	60	75	100	100	100	-	100	100	125	117,65	111,11	-
	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Persen	-	-	100	90	90	-	-	-	98	88	85	-	-	-	98	97,78	94,44	-
	Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Persen	18	18	9	9	9	-	8	10,91	15,5	14,86	-15	-	44,44	60,61	172,22	165,11	-166,67	-
	Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100
	Persentase akurasi data BMD Kabupaten Bantul tahun n-1	Persen	75	75	100	100	100	100	99,94	88,02	82,05	99,73	98,91	100	133,25	117,36	82,05	99,73	98,91	100
3.	Indikator Kegiatan																			
	Capaian kinerja penyusunan dokumen rencana anggaran daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian kinerja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Jumlah dokumen KUA-PPAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersedianya acuan penyusunan RAPBD/RPAPBD	Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan JKK	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Plaporan JKM	laoran	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah SKPP	surat	-	533	-	-	-	-	-	533	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD	lembar	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	BA rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah laporan PPh pasal 21 gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SP2D PFK yang diterbitkan dalam 1 tahun	SP2D	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen pemotongan dan penyetoran PFK	Dokumen	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	BA rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan	BA	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BA hasil rekonsiliasi dengan PT Taspen untuk jumlah PNS , iuran wajib 8% , JKK dan JKM	BA	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah daftar gaji bulanan dan tunjangan per unit kerja	daftar gaji	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SKPP	Dok	-	-	550	-	-	-	-	-	550	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	Lap	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)	BA	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21	Kali	-	-	-	156	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	Dokumen	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersusunnya rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dok	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SKPP yang diterbitkan	Dok	-	-	-	400	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	154	-	-
	Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-
	Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SKPP	SKPP	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SP2D gaji	Daftar	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemotongan dan penyeteroran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi	berita acara	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	rekonsiliasi belanja, pendapatan BLUD dan Dana bergulir	dokumen	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Pendapatan BLUD	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil rekonsiliasi belanja	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dana bergulir	Semester	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi Belanja	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan realisasi APBD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi DIY	laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan penyerapan DAK	Lap	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	100	100	100	-
	Evaluasi penyerapan DAK	Lap	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	100	100	-	-
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov DIY	Lap	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Konfirmasi Dana Ttransfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	laporan	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dana Transfer	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Draf PKS Penyaluran BOP PAUD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-	-	-		5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-
	Terpenuhinya kebutuhan box arsip	buah	-	525	-	-	-	-	-	525	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	terkelolanya arsip BKAD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)	modul	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penggandaan modul ASB	modul	-	75	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6,666667	-	-	-	-
	Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)	Modul	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Modul ASB	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Raperbup tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Raperbup	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Raperbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	Raperbup	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Peraturan daerah	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perda tentang APBD	Perda	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perbup tentang penjabaran APBD	Perbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	peraturan daerah	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah Perda tentang perubahan APBD	Perda Perubahan APBD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD	Perbup Perubahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	-
	Jumlah pengandaan raperda dan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	100	-	100	100	-
	umlah pengadaan raperbub dan perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	Buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Launching TNT Retribusi	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT Pengeluaran dan Penerimaan Daerah	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi pelaksanaan TNT	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Draft perbup TNT	Dok	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT	Kali	-	-	2	202	-	-	-	-	2	202	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya TNT dalam pengelolaan belanja daerah	Pakta Integritas	-	-	376	-	-	-	-	-	376	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD	Kali	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Bimtek CMS	Kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT (SD)	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi TNT	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Launching Sidat Keuda	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Persiapan Pelaksanaan TNT	Desa	-	-	-	75	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Bimtek CMS (SD)	Orang	-	-	-	281	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penilaian penyerapan belanja langsung pada OPD	OPD	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplikasi Informasi Keuangan Daerah	aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	Aplikasi	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen	dokumen	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Kajian penempatan uang daerah	kajian	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	MOU Penempatan Uang Daerah	MOU	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Surat pencairan uang daerah yang belum digunakan untuk dideposito pada bank umum	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-
	Kajian pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-
	Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	11	12	-	-	-	-	11	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	BA	-	-	143	144	-	-	-	-	143	144	-	-	-	-	100	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Telaah penyertaan modal daerah PT Bank Dokumen Pembangunan Daerah (BPD)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah	SK	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Pelaporan penerimaan bunga deposito	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Analisis Investasi Daerah	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah	Dok	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	SK	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-
	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati	dokumen	-	116	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun	Dokumen	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	192	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	115,625	-	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	146,3542	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Digandakan dalam bentuk buku	buku	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar	dokumen	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya anggaran kas murni dan perubahan	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	dokumen	-	570	-	-	-	-	-	554	-	-	-	-	-	97,19298	#VALUE!	-	-	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SPD	-	-	570	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	87,19298	-	-	-
	Jumlah penerbitan SPD	SPD	-	-	-	585	-	-	-	-	-	540	-	-	-	-	-	92,30769	-	-
	Dokumen SPD	Dokumen	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SP2D	-	9145	-	-	-	-	-	9145	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	Dokumen	-	-	216	216	-	-	-	-	216	216	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan DTH dan RTH	Laporan	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Dokumen	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang besaran uang Persediaan OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan SP2D	SP2D	-	-	12000	-	-	-	-	-	12000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang penunjukan PA , KPA , Bendahara Pengeluaran Pembantu , dan Bendahara Penerima pada OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi DTH dan RTH	Aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	Dok	-	-	-	8956	-	-	-	-	-	6514	-	-	-	-	-	72,73336	-	-
	Sosialisasi DTH/RTH	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan DTH dan RTH	Bulan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen SP2D	Dokumen	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan TPTGR	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan TGR	Kali	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan evaluasi TGR	Dok	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis TGR	Lap	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sosialisasi aturan TPGR	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Draf neraca kompilasi per 31 Desember 2016	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Neraca bulanan SKPD	dokumen	-	672	-	-	-	-	-	612	-	-	-	-	-	91,07143	-	-	-	-
	Coaching clinic	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Neraca bulanan OPD dan draft neraca kompilasi	Neraca	-	-	673	-	-	-	-	-	673	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Neraca bulan SKPD	Dokumen	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca kompilasi perakhir tahun anggaran	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Choaching clinic	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Neraca SKPD bulanan	Dokumen	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-
	SPT masa akhir bulan	SPT	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Form 1721 A2	lembar	-	11241	9022	-	-	-	-	11241	9022	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	PNS/CPN S	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	100	-	-
	SPT Masa Tahun 2018	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penerbitan form 1721 A2	Lembar	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul	Buku	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	Intensifikasi pajak daerah	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pengendalian dan pengawasan rekening PJU	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penelitian Lapangan Obyek Pajak BPHTB	OP	-	-	3000	-	-	-	-	-	2545	-	-	-	-	-	84,833333	-	-	-
	Jumlah Pemantauan Pajak	OK	-	-	2700	-	-	-	-	-	2250	-	-	-	-	-	83,333333	-	-	-
	Jumlah Sosialisasi Validasi sehari	kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah jasa konsultasi pengembangan SISMIOP	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Komputer dan Printer	unit	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Aplikasi SIM Mobile apps	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah seragam petugas Validasi sehaari	op	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Pajak Daerah siaran radio	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah spanduk atau leaflet Pajak Daerah	Lembar	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	Orang	-	-	-	500	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	78	-	-
	Jumlah media publikasi	Media	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi pengurangan pajak daerah	Unit	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	111.09	-	-	-	-	-	#VALUE!	-
	Laporan semester I dan prognosis semester II	laporan	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II	Buku	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah media informasi yang disediakan	media	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi kepada wajib pajak tentang PPh OP	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh OP	Kali	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP	Orang	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tercapainya target bagi hasil PPh	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)	dokumen	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun	Surat	-	-	160	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	58,125	-	-	-
	Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Surat	-	-	-	204	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	57,35294	-	-
	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	Dokumen	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	233	-	-	-	-	-	114,2157	-
	Penyaluran belanja tidak langsung PPKD	rupiah	-	327	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah	rupiah	-	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Terlaksananya rekonsiliasi belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah	kali	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS (Berita Acara)	Berita acara	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan BPJS	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan pajak atas nama Kuasa BUD	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan IWP	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan Taperum	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan PPh pasal 21	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja SKPD dengan data belanja BKAD	Berita Acara	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan DTH dan RTH	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya SOP BKAD	Dokumen	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terpenuhinya software yang diperlukan di server simda Keuangan	unit	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya studi banding tentang simda keuangan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercapainya pendapatan asli daerah	Prosen	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi penentuan target PAD	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	orang	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pelaksanaan fokus group discussion (FGD)pelayanan BPHTB bersama IPPAT, BPN dan KPPPratama Kab. Bant	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen hasil monev pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah	Laporan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pencocokan data PAD dengan OPD penghasil dan pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan target realisasi PAD setiap bulan	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat	Jenis	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan hasil rekonsiliasi	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	jumlah wajib pajak yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	27632	-	-	-	-	-	27632	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pemeliharaan aplikasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	kali	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Aplikasi BPHTB Online	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah WP yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	-	24593	-	-	-	-	-	25405	-	-	-	-	-	103,3018	-	-	-
	Jumlah cetak blangko	kali	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rapat koordinasi pelayanan pajak	kali	-	-	30	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	33,33333	-	-	-
	Terlayannya wajib pajak dengan baik	Jenis Pajak	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pengadaan stabilizer	Unit	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terpenuhinya pelayanan pajak daerah	Wajib Pajak	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	31141	-	-	-	-	-	124,564	-	-
	Jumlah pengadaan genset	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pajak Daerah	Orang	-	-	-	400	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	75	-	-
	Pelayanan pajak daerah	Jenis pajak	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Aplikasi Web Service Pajak Reklame	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya cetak surat tagihan pajak	lembar	-	500000	-	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh	Kecamatan	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	orang	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	wajib pajak baru	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	WP	-	-	80	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	337,5	-	-	-
	Penambahan NPWPD	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	152	-	-	-	-	-	190	-	-
	Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah	WP/OP	-	-	-	150	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-	172	-	-
	Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	326,25	-	-
	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	440	-
	Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	arsip PBB	-	14000	-	-	-	-	-	14000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pemasangan baliho (titik)	Buah	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya gathering wp taat pajak	Kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pengadaan stiker mobil	UNIT	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan	kali	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Stimulan PBB untuk Dukuh, Lurah dan Camat	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi Pajak Daerah	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Gathering bersama wajib Pajak	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terlaksananya pengadaan kelengkapan mobil pajak	unit	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Studi potensi pajak daerah	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Jumlah jasa konsultasi aplikasi PAD	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi media cetak dan elektronik	macam	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya Pameran di Bantul Expo	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya sosialisasi LAPak Bantul	Kecamatan	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah barang untuk penghaargaan wajib pajak	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tenda Mobil Operasional Pajak Daerah	buah	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	JUmlah jasa konsultasi sms broadcast PBB	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Cetak leaflet Pajak Daerah, Tagihan Pajak Daerah dan undangan gatering WP	LS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Peralatan Personal Komputer (Laptop, Barcode Scanner dan Printer Kasir)	Unit	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kursi Tunggu	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peralatan Studio Video dan Film (Kamera,Lensa,Gimbal, Tripord, Camcorder, Lighting)	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	Orang	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sound System	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Baliho Sosialisasi PAD	buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Meja Rapat	Unit	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	Persen	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	105,86	-	-	-	-	-	151,2286	-
	Menyediakan ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak	Paket	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan	kecamatan	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cetak masal SPPT PBB P2	lembar	-	616717	-	-	-	-	-	616717	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pendistribusian SPPT PBB ke desa	desa	-	75	-	75	-	-	-	75	-	75	-	-	-	100	-	100	-	-
	Penyerahan simbolis SPPT PBB	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SPPT yang tersampaikan kepada wajib pajak	lembar	-	-	650000	-	-	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah sosialisasi PBB P2	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah publikasi Pajak daerah melalui videotron dan baliho	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Monitoring Penyampaian SPPT PBB P2	klai	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Pencetakan SPPT PBB Berbarcode	Lembar	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	97,69231	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	Peserta	-	-	-	1350	-	-	-	-	-	1135	-	-	-	-	-	84,07407	-	-
	Launching PBB P2	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	Lokasi	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-
	SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Penetapan SPPT PBB	Lembar	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	635831	-	-	-	-	-	100,1309	-
	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah sosialisasi di bidang cukai	Kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	orang	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai ilegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak	Jenis Media	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah	Perbup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah	Raperbub	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbub	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun	Raperbub	-	11	11	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	100	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pendataan PBB P2	desa	-	4	3	4	-	-	-	4	3	3	-	-	-	100	100	75	-	-
	Jumlah SPOP/LSPOP dari pemutakhiran data PBB P2	Jumlah SPOP	-	52000	-	-	-	-	-	52000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Objek Pajak yang dilakukan pendataan	objek pajak	-	-	-	50000	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	-	66,238	-	-
	Validitas sesuai dengan data BPN	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Cetak SPOP dan LSPOP	Kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	Desa	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pembuatan Banner	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembuatan Iklan Layanan TNT	titik	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Sosialisasi TNT	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Roadshow TNT	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah forum komunikasi pengurus barang	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	Orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	141,6667	-	-
	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD	OPD	-	416	430	-	-	-	-	416	430	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Laporan mutasi barang milik daerah	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah	dokumen	-	7	6	-	-	-	-	7	11	-	-	-	-	100	183,3333	-	-	-
	Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	Orang	-	-	-	485	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	103,0928	-	-
	Laporan RKBMD dan RKPMD	Laporan	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah perjanjian (dokumen)	dokumen	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan	SK	-	4	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah berita acara	berita acara	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	4	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	975	-	-
	Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dok	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	SK	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Penilaian Aset	Buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien	SK	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien	SK	-	-	20	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	95	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD	SK	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	200	-	-
	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah Laporan BMD (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Buku induk inventaris tahun n-1	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah laporan mutasi dan semesteran (awal, penambahan, pengurangan, akhir) berbasis SIMAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SK Bupati atas pengguna BMD tahun n-1	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD	Laporan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen sensus BMD	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Mutasi dan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh SKPD tahun 2016	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2016	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1	Laporan	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)	berita acara	-	240	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja	BA	-	-	240	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	91,66667	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	Orang	-	-	-	135	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	740,7407	-	-
	Laporan aset tetap triwulan	Laporan	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan persediaan	Laporan	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	100	-
	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	100	-
	Pelayanan pinjam BPKB(surat keterangan pengganti BPKB) kendaraan dinas/operasional	BPKB	-	1642	-	-	-	-	-	1642	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Papan nama instansi	buah	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan	Dokumen	-	-	1992	-	-	-	-	-	1674	-	-	-	-	-	84,03614	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah	Raperbub	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Pengamanan Sertifikat	Sertifikat	-	-	-	250	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	102	-	-
	Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	BPKB	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	98,03922	-	-
	Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	100	-
	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah	PERDA	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	200	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengadaan buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	unit	-	3200	-	-	-	-	-	3200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	jumlah buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	Jenis	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Sumber : Esakip ROPK BKAD 2016-2020

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BKAD sebagai berikut:

1. Opini pemeriksaan BPK

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak LKPD tahun 2012 sampai dengan 2020. Diraihnya opini WTP tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin memperhatikan tingkat akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

2. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah semester I dibanding dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan semester I. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan ketugasan BKAD untuk mengatur manajemen kas guna menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain itu anggaran kas

juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Selama tahun 2016, 2017 dan tahun 2019 penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi dana yang diatur dalam anggaran kas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya keterlambatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis DAK dan juga karena adanya lelang gagal/tertunda untuk beberapa pelaksanaan kegiatan di suatu perangkat daerah.

3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Selama tahun 2016 s/d 2021 persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 93,35% dan tertinggi dicapai tahun 2020 yaitu sebesar 101,9%. Persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan beberapa hal, diantaranya :

- a. Adanya transfer pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada bulan Desember 2018 untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana di Kabupaten Bantul.
- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa pendapatan BOS yang semula merupakan komponen pendapatan asli daerah dialihkan sebagai komponen pendapatan hibah.

4. Persentase PAD terhadap belanja daerah

Indikator ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021, persentase capaian PAD terhadap belanja daerah cenderung fluktuatif, dengan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 111,1% dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 160,9%. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 persentase capaian PAD terhadap belanja daerah mampu memenuhi target yang direncanakan dalam mendanai belanja daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian atas indikator kinerja utama pada tabel 2.11 menunjukkan keberhasilan atas kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan oleh BKAD pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selama kurun tahun 2016-2021. Hal tersebut didukung dengan

terlaksananya berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BKAD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran BKAD selaku SKPD dan anggaran BKAD selaku SKPKD. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, fungsi SKPKD tersebut menjadi salah satu fungsi yang melekat dengan ketugasan BKAD sehingga pada tahun 2021-2026 penganggaran untuk belanja SKPKD menjadi satu dengan penganggaran BPKPAD selaku PD.

a. BKAD selaku Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah, Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Sedangkan Belanja Langsung untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dimana terdapat 4 (empat) program pendukung/penunjang dan 2 (dua) program utama/prioritas dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama. Program-program pendukung/penunjang tersebut yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program-program tersebut merupakan program yang mendukung secara tidak langsung/tidak terkait secara langsung dalam pencapaian atas indikator kinerja utama BKAD atau sebagai program pendukung/program penunjang. Sedangkan program utama/prioritas merupakan program yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang terdiri dari:

- 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- 3) Program Pengelolaan Barang Daerah

Untuk program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota mulai tahun 2018 digabung dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah karena adanya penyederhanaan program/kegiatan.

Anggaran dan realisasi pendanaan untuk terselenggaranya pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah
 Kabupaten Bantul

NO.	URAIAN	TARGET (dalam Jutaan)						REALISASI (dalam Jutaan)						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	163.886,96	173.215,93	197.518,80	244.071,37	215.762,03	1.964.253,05	192.281,26	214.717,37	228.142,67	266.189,21	245.750,62	1.964.253,05	117,33	123,96	115,50	109,06	113,90	100,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.886,96	173.215,93	197.518,80	244.071,37	215.762,03	261.015,97	192.281,26	214.717,37	228.142,67	266.189,21	245.750,62	261.015,97	117,33	123,96	115,50	109,06	113,90	100,00
	Pendapatan Pajak Daerah	114.668,27	131.491,50	160.071,10	198.715,50	175.265,48	221.912,30	133.474,74	165.576,62	182.127,31	213.628,74	200.826,19	221.912,30	116,40	125,92	113,78	107,50	114,58	100,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.068,27	20.184,43	19.652,87	21.883,86	24.704,14	23.707,17	21.068,27	20.130,44	19.652,87	21.945,04	25.137,58	23.707,17	100,00	99,73	100,00	100,28	101,75	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.150,42	21.540,00	17.794,83	23.472,01	15.792,41	15.396,50	37.738,25	29.010,32	26.362,49	30.615,43	19.786,86	15.396,50	134,06	134,68	148,15	130,43	125,29	100,00
	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	-	1.697.237,08	-	-	-	-	-	1.697.237,08	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	1.420.644,09	-	-	-	-	-	1.420.644,09	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	276.592,99	-	-	-	-	-	276.592,99	-	-	-	-	-	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	100,00
2	BELANJA	69.726,39	-	79.618,26	84.216,21	88.482,48	388.959,71	58.736,01	65.593,45	69.045,09	77.524,07	82.286,89	388.959,71	84,24	83,55	86,72	92,05	93,00	100,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.713,31	-	31.419,31	30.242,87	44.706,69	-	30.380,25	27.886,83	26.299,76	28.490,74	42.488,22	-	82,75	72,75	83,71	94,21	95,04	-
	Belanja Pegawai	36.713,31	-	31.419,31	30.242,87	44.706,69	-	30.380,25	27.886,83	26.299,76	28.490,74	42.488,22	-	82,75	72,75	83,71	94,21	95,04	-
	BELANJA LANGSUNG	33.013,08	-	48.198,95	53.973,35	43.775,79	-	28.355,77	37.706,62	42.745,33	49.033,33	39.798,67	-	85,89	93,85	88,69	90,85	90,91	-
	Belanja Pegawai	965,41	-	1.289,44	1.964,83	1.719,46	-	815,46	953,62	1.109,14	1.751,99	1.672,30	-	84,47	86,92	86,02	89,17	97,26	-
	Belanja Barang Jasa	29.181,64	-	38.585,58	41.345,05	41.345,59	-	25.448,04	30.476,45	34.171,86	37.147,68	37.460,80	-	87,21	94,37	88,56	89,85	90,60	-
	Belanja Modal	2.866,03	-	8.323,94	10.663,47	710,74	-	2.092,27	6.276,55	7.464,33	10.133,66	665,56	-	73,00	92,49	89,67	95,03	-	-

NO.	URAIAN	TARGET (dalam Jutaan)						REALISASI (dalam Jutaan)						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	100,00

Sumber data : Laporan Keuangan BKAD 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi pendapatan daerah yang dikelola oleh BKAD selaku SKPD penghasil selama periode tahun 2016-2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif atau diatas target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan BKAD diantaranya edukasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi supaya semakin sadar dengan kewajibannya, peningkatan sarana prasarana penunjang, serta adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BKAD untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Inovasi tersebut diantaranya:

1. Pelayanan mobil keliling pajak, untuk mempermudah pembayaran wajib pajak di pelosok pedesaan.
2. Aplikasi LAPak Bantul, untuk mempermudah layanan dan informasi pajak daerah berbasis android.
3. Aplikasi e-SPTPD, untuk monitoring pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online
4. Anjungan Pelayanan Mandiri, untuk mencetak bukti print out pembayaran PBB P2 dan untuk memeriksa alur berkas permohonan validasi BPHTB sehingga wajib pajak dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa antri di loket.

Sedang dari sisi belanja daerah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya.

Dari setiap tahun anggaran untuk program pendukung/penunjang lebih tinggi daripada anggaran untuk program utama/program prioritas, hal tersebut dikarenakan realisasi terbesar untuk terlaksananya program administrasi perkantoran untuk mendanai pembayaran listrik gedung dan penerangan jalan dan kampung umum, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendanai kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan pengadaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diajukan, sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi BKAD sebagai pembantu pengelola BMD.

b. BKAD selaku SKPKD

Di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 17 Juli 2019 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan penatausahaan Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPKD tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD Kabupaten Bantul

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	1.720.050,85	1.637.031,21	1.773.960,06	1.791.021,09	1.736.631,22	1.595.879,46	1.592.699,92	1.765.098,07	1.763.609,70	1.625.229,85	92,78	97,29	99,50	98,47	93,59
	DANA PERIMBANGAN	1.467.486,05	1.339.148,83	1.377.353,89	1.388.065,95	1.279.745,47	1.331.352,78	1.287.256,26	1.355.455,93	1.351.157,10	1.268.337,75	90,72	96,12	98,41	97,34	99,11
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.277,44	45.663,36	39.033,47	30.721,41	31.097,25	39.338,42	34.871,18	30.584,17	19.947,00	36.480,47	100,16	76,37	78,35	64,93	117,31
	Dana Alokasi Umum	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	931.996,01	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	923.213,61	100,00	100,00	100,00	100,00	99,06
	Dana Alokasi Khusus	428.394,25	311.234,63	356.069,58	342.041,70	316.652,21	292.200,00	270.134,24	342.620,92	315.907,25	308.643,68	68,21	86,79	96,22	92,36	97,47
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252.564,80	297.882,37	396.606,17	402.955,14	456.885,75	264.526,69	305.443,66	409.642,14	412.452,60	356.892,10	104,74	102,54	103,29	102,36	78,11
	Pendapatan Hibah	6.250,00	8.880,12	139.820,47	78.199,30	82.217,39	6.148,74	10.598,77	139.341,83	77.281,17	83.860,18	98,38	119,35	99,66	98,83	102,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	122.724,05	139.206,07	141.733,53	154.194,89	152.621,84	137.137,21	145.068,72	155.587,03	164.965,84	159.398,66	111,74	104,21	109,77	106,99	104,44
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	191.989,03	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	86.583,56	100,00	100,00	100,00	100,00	45,10
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.677,80	18.105,09	1.726,07	4.598,00	30.057,49	21.327,80	18.085,09	1.387,17	4.356,00	27.049,70	90,08	99,89	80,37	94,74	89,99
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	113,36	-	-	-	-	-	-					-
2	BELANJA	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	Belanja Hibah	32.460,40	55.401,11	57.130,01	68.964,54	87.919,85	31.862,07	50.474,19	44.796,02	59.645,56	84.737,76	98,16	91,11	78,41	86,49	96,38
	Belanja Bantuan Sosial	5.578,55	3.901,10	9.118,20	9.047,52	2.835,00	3.267,35	1.650,30	7.852,09	6.920,02	759,90	58,57	42,30	86,11	76,49	26,80
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.664,76	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	12.430,00	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	98,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.396,58	231.802,58	245.899,46	256.814,88	268.118,53	185.304,70	222.760,21	244.600,59	251.170,94	161.477,55	94,84	96,10	99,47	97,80	60,23
	Belanja Tidak Terduga	23.736,82	34.319,27	32.935,52	16.679,92	142.765,84	520,87	2.121,33	405,54	1.312,42	101.571,86	2,19	6,18	1,23	7,87	71,15
	SURPLUS/ (DEFISIT)	1.450.213,75	1.297.276,96	1.411.077,89	1.417.223,68	1.212.120,48	1.362.494,48	1.301.363,70	1.449.644,85	1.422.270,21	1.253.811,27	93,95	100,32	102,73	100,36	103,44
3	PEMBIAYAAN DAERAH															
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	292.736,05	261.482,04	257.936,31	307.842,00	263.047,64	293.078,44	261.454,28	256.630,48	296.985,01	238.678,71	100,12	99,99	99,49	96,47	90,74
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	283.026,05	254.772,04	247.226,31	279.158,25	234.047,64	283.026,05	254.841,68	247.144,69	279.158,25	234.047,64	100,00	100,03	99,97	100,00	100,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sahkan	-	-	-	2.973,75	-	1.341,87	-	-	2.973,75	713,34	-	-	-	100,00	-
	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	9.710,00	6.710,00	10.710,00	10.710,00	11.000,00	8.710,52	6.612,60	9.485,79	7.853,01	3.917,74	89,71	98,55	88,57	73,32	35,62
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.755,00	25.860,00	42.435,00	61.960,00	37.000,82	24.752,00	24.364,80	39.572,50	48.891,50	11.598,82	92,51	94,22	93,25	78,91	31,35
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.825,00	8.000,82	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.300,00	8.000,82	100,00	100,00	100,00	98,49	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Dana Bergulir	10.710,00	8.710,00	10.935,00	12.135,00	11.000,00	8.707,00	7.214,80	8.072,50	7.591,50	3.598,00	81,30	82,83	73,82	62,56	32,71

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	PEMBIAYAAN NETTO	265.981,05	235.622,04	215.501,31	245.882,00	226.046,82	268.326,44	237.089,48	217.057,98	248.093,51	227.079,90	100,88	100,62	100,72	100,90	100,46

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SKPKD 2016-2020

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja tidak langsung SKPKD mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Realisasi belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 91,32%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 70,81%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan sosial yang dianggarkan (WRSE, PKH) tidak dicairkan untuk menghindari duplikasi anggaran dengan program BLT.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa capaian realisasi 60,23% disebabkan karena dana desa, sebagai salah satu komponen Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, pencairannya mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 40/PMK.07/2020 yang menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran dana desa dari APBN untuk tahun anggaran 2020 langsung ke rekening desa dan tidak melalui kas daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BPKPAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BPKPAD Kabupaten Bantul.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran;
2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual;
3. Belum memadainya pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
4. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DIY;
5. Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan;
6. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset pada beberapa perangkat daerah belum tertib;
7. Pemahaman sumber daya pengelola aset yang belum maksimal;
8. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat;

9. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah;
10. Penurunan kemampuan membayar pajak Non-PBB yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan;
2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Kondisi wilayah Kabupaten Bantul yang luas dan masih alami dapat meningkatkan sektor pariwisata jika terus dikembangkan, sehingga pendapatan dari sektor pajak akan meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

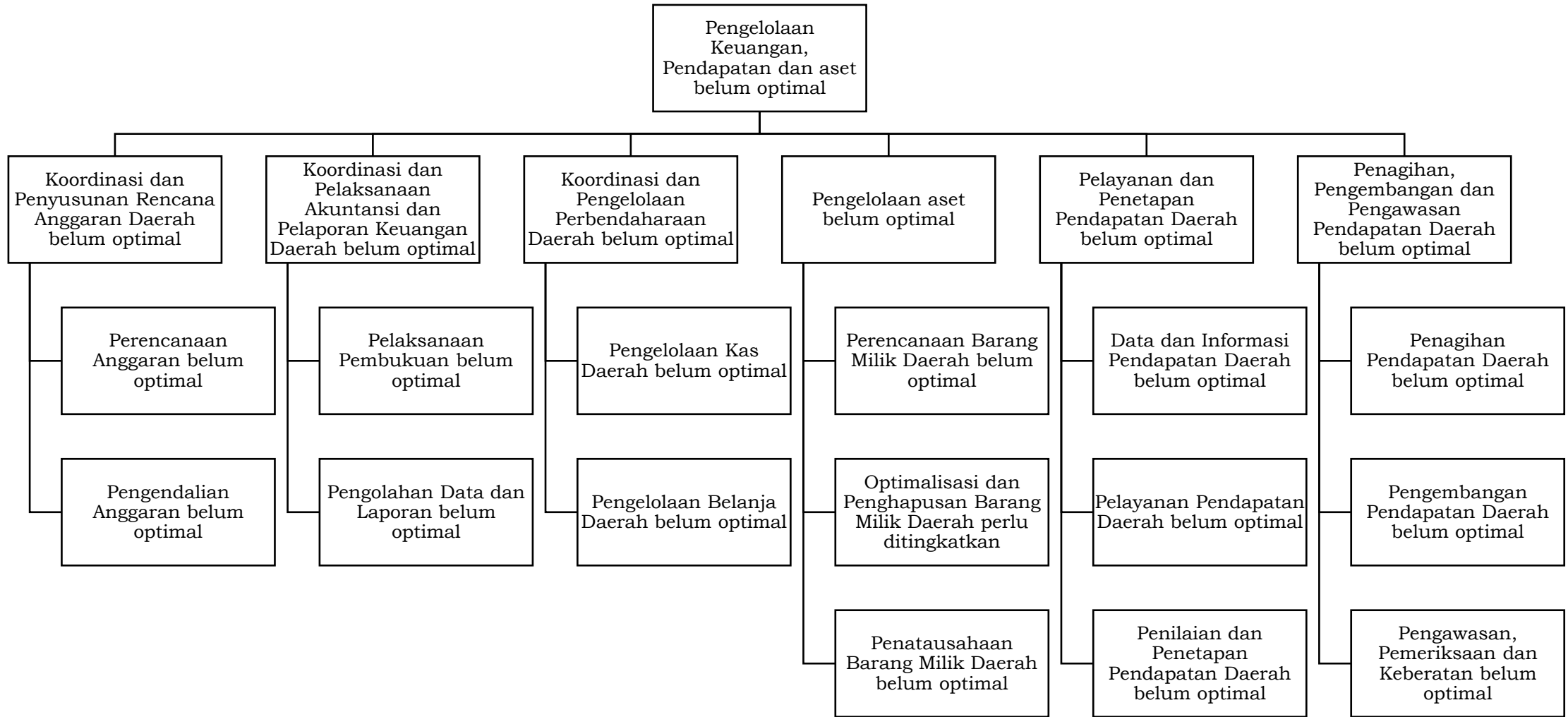
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II diatas, BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang dapat dipetakan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan belum optimal
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
- c. Pengelolaan pendapatan belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisa pohon masalah



Dari analisa pohon masalah tersebut dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset belum optimal	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah belum optimal	Perencanaan Anggaran belum optimal	
		Pengendalian Anggaran belum optimal	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah belum optimal	Pelaksanaan Pembukuan belum optimal	
		Pengolahan Data dan Laporan belum optimal	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah belum optimal	Pengelolaan Kas Daerah belum optimal	
		Pengelolaan Belanja Daerah belum optimal	
	Pengelolaan aset belum optimal	Pengelolaan aset belum optimal	Perencanaan Barang Milik Daerah belum optimal
			Optimalisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan
			Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal
	Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal	Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal	Data dan Informasi Pendapatan Daerah belum optimal
			Pelayanan Pendapatan Daerah belum optimal
			Penilaian dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal
	Penagihan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah belum optimal	Penagihan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah belum optimal	Penagihan Pendapatan Daerah belum optimal
			Pengembangan Pendapatan Daerah belum optimal
			Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi bagi suatu daerah diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan kata lain visi diperlukan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika.”**

Misi yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran visi tersebut adalah :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, BPKPAD sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Pencapaian misi ke-1 tersebut tentunya dijumpai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di BPKPAD. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1 Penguatan reformasi birokrasi menuju	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan	Adanya Belanja yang tidak sesuai dengan penganggaran dan	Komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</p>	<p>pengembangan sumber daya aparatur.</p>	ketentuan yang ada.	tugas dan fungsi BPKPAD
		Belum maksimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan
		Pemahaman pengelola keuangan dimasing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai.	Pembinaan kepada pengelola keuangan dan barang
		Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah	Pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak
		Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemda DIY
		Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan
		Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset daerah belum tertib.	Pembinaan kepada pengelola barang
		Sumber daya pengelola aset belum maksimal	Pembinaan kepada pengelola barang
		Ruang pelayanan pajak tidak representative	Penggunaan teknologi informasi
		Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja	Penggunaan teknologi informasi

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat	Regulasi penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
		Penurunan kemampuan membayar pajak yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.	
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	Modul penganggaran dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul pelaporan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul penatausahaan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	Sistem Informasi aset belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Data wajib pajak daerah belum Update	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Keuangan

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disebutkan tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan tersebut, telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis kementerian maupun mengukur pencapaian Program.

Terdapat lima indikator kinerja yang menjadi amanah Kementerian Keuangan dalam mendukung dua sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) Rasio perpajakan terhadap PDB; (2) Imbal hasil (Yield) Surat Berharga Negara; (3) Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat; dan (4) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system) yang mendukung sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dalam Agenda Pembangunan 1. Selain itu terdapat indikator kinerja Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan 7.

3.3.2. Telaah Renstra BPKA Provinsi DIY

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 menyebutkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Optimalisasi aset Pemda DIY;
4. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. Peningkatan manajemen mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Pencapaian target Deviden PT Bank BPD DIY yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8. Pencapaian target Deviden PT AMI yang mendukung peningkatan PAD;
9. Pencapaian target Deviden PT Taru Martani yang mendukung peningkatan PAD;

10. Legalitas Kelembagaan BUKP yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
11. Pencapaian target Deviden BUKP yang mendukung peningkatan PAD
- Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam Renstra 2017-2022 adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel. Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPKA DIY seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPKA DIY
Tahun 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Keuangan RI
Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.	Adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan pajak dan retribusi	Kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; 3. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.	Peraturan berubah-ubah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian Belum memadainya aplikasi pengelolaan barang milik daerah	Koordinasi dan konsultasi yang cepat dan baik. Terlaksananya Inventarisasi aset berkelanjutan

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul
terhadap Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY

Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya sosialisasi terhadap suatu ketentuan/aturan sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda	Koordinasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah;
Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Dokumen hibah dan penyerahan aset tidak lengkap	Koordinasi yang baik dalam inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi DIY

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi BPKPAD, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program kegiatan yang di rencanakan telah mengintegrasikan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan demikian faktor–faktor pendorong dan penghambat pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut;

Tabel 3.6
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar 51,16% pada tahun 2024 (2019 : 11%)	1. Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah; 2. Data wajib pajak daerah belum update.	1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar	3. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan	2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		12% pada 2024 (2019 : 1,44%)	dan membayar obyek pajak masih rendah.	besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik menjadi 20,96% pada 2024 (2019 : 15,51%)		3. Kabupaten Bantul memiliki banyak destinasi wisata sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan dari sektor pajak
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024	1. Tata kelola BUMD belum optimal. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD masih rendah.	1. Pemerintah Daerah memiliki BUMD yang bergerak di berbagai sektor. 2. Regulasi yang jelas tentang status dan kedudukan BUMD.
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024		

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pada pembahasan diatas, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola aset;
5. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi;
6. Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPKPAD berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, selain itu BPKPAD juga melakukan upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

Setelah dilakukan identifikasi isu-isu strategis seperti diatas, perlu dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	30
2.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	28
3.	Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	27
4.	Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani	15
	TOTAL	100

Tabel. 3.8
Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total Skor
		1	2	3	4	
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	270	252	243	135	900
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	240	224	216	120	800
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30	28	27	15	100
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	120	112	108	60	400
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	60	56	54	30	200
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	60	56	54	30	200

Tabel 3.9
Rata – Rata Skor Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	3,85
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	200	7,69
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	200	7,69

Tabel 3.10
Penentuan Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2021-2026) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPKPAD.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	6 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 persen	21,69 persen	22,19 persen	22,69 persen	23,19 persen	23,69 persen	23,69 persen

Sumber : BKAD 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di BPKPAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar BPKPAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS) :	KELEMAHAN (WEAKNESSES):
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang jelas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 2. Metode kerja dan landasan kerja yang pasti. 3. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah 4. Pelayanan mobil keliling dan adanya aplikasi untuk mempermudah pelayanan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database potensi Pendapatan Asli Daerah belum tersedia 2. Jumlah SDM belum sesuai formasi 3. Ruang pelayanan tidak representatif 4. Kompetensi dan kapabilitas SDM belum memadai
PELUANG (OPPORTUNITIES):	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi 2. Pemberian kewenangan dari pusat kepada daerah yang lebih besar dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Perkembangan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan (S1,2-O1,3) 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1) 3. Meningkatkan pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1) 4. Mempermudah pelayanan pajak (S1,2,4-O2,3) 5. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi (S3,4-O3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan potensi pendapatan (W1-O1,2) 2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-O1,2) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan asset (W2,4-O1) 4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-O1) 5. Mengoptimalkan SDM yang ada (W2,4-O1,3) 6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-O3)
ANCAMAN (THREATS) :	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Keuangan Daerah belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (S1-T1,2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan potensi pendapatan (W1-T4,6)

<ul style="list-style-type: none"> 2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal 3. Pengelolaan dana transfer tergantung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi 4. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari Pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat 5. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset perangkat daerah belum tertib 6. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (S1-T4) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (S1,3-T5) 4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi (S1,2,-T1,2,3) 5. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah (S1,2,4-T4,6) 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-T1,2) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-T4) 4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (W2,4-T5) 5. Sosialisasi dan publikasi pengelolaan pendapatan (W1-T4,6) 6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-T1,2,4)
---	--	---

Dari analisa SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT kemudian dilakukan pengelompokan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokan Strategi

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan	
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
Mengoptimalkan SDM yang ada	

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatkan pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	
Mempermudah pelayanan pajak	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan	
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah	
Pendataan potensi pendapatan	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	

Relevansi dan konsistensi antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPKPAD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika."			
Misi: "1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
			Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan
			Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator BPKPAD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Opini Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah			Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah catatan hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	6 Jumlah		5 Jumlah		5 Jumlah		4 Jumlah		4 Jumlah		4 Jumlah		4 Jumlah		
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan urusan keistimewaan yang berkualitas	(Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100%	80%	80%	299,595,500	83%	500,000,000	85%	550,000,000	88%	605,000,000	90%	665,500,000	90%	2,620,095,500		Bidang Anggaran ; Bidang Perbendaharaan	
		4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan	100 Persen	100 Persen	299,595,500	100 Persen	500,000,000	100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	2,620,095,500		Bidang Anggaran ; Bidang Perbendaharaan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					dikalikan 100 %																
		4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan		3 Laporan	4 Dokumen	149,595,500	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	275,000,000	4 Dokumen	302,500,000	4 Dokumen	332,750,000	4 Dokumen	1,309,845,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab Bantul	
				Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				
		4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul		12 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	275,000,000	3 Dokumen	302,500,000	3 Dokumen	332,750,000	3 Dokumen	1,310,250,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat	84.14 Angka	84,5 Angka	41,544,411,169	85 Angka	60,728,533,000	85 Angka	59,155,052,000	85,5 Angka	63,755,873,000	85,5 Angka	61,497,910,000	85,5 Angka	286,681,779,169	Sekretariat, Bidang Aset	Kab Bantul	
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %		100 Persen	100 Persen	84,450,000	100 Persen	102,000,000	100 Persen	104,000,000	100 Persen	106,000,000	100 Persen	106,000,000	100 Persen	502,450,000	Sekretariat	Kab Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	35,570,000	100 Persen	66,000,000	100 Persen	72,000,000	100 Persen	78,000,000	100 Persen	78,000,000	100 Persen	329,570,000	Sekretariat	
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian		-	8 Dokumen	14,570,000	8 Dokumen	11,000,000	8 Dokumen	12,000,000	8 Dokumen	13,000,000	8 Dokumen	13,000,000	8 Dokumen	63,570,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Dokumen SOP		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian		170 Orang	-	21,000,000	170 orang	55,000,000	170 Orang	60,000,000	170 Orang	65,000,000	170 Orang	65,000,000	850 Orang	266,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Pengiriman bimtek		3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	1,738,985,950	100 Persen	2,021,000,000	100 Persen	2,184,000,000	100 Persen	2,347,000,000	100 Persen	2,347,000,000	100 Persen	10,637,985,950	Sekretariat	
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		6 Jenis	5 Jenis	2,000,000	6 Jenis	7,000,000	6 Jenis	8,000,000	6 Jenis	9,000,000	6 Jenis	9,000,000	6 Jenis	35,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		-	35 Jenis	436,312,450	53 Jenis	550,000,000	53 Jenis	600,000,000	53 Jenis	650,000,000	53 Jenis	650,000,000	53 Jenis	2,886,312,450	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten
				Buku Cek		-	5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku			
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		14 Unit	16 Jenis	85,143,500	16 Jenis	45,000,000	16 Jenis	50,000,000	16 Jenis	55,000,000	16 Jenis	55,000,000	16 Jenis	290,143,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		5 Jenis	3 Jenis	326,940,500	3 Jenis	450,000,000	3 Jenis	500,000,000	3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	2,376,940,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten
				Penggandaan		1209 Lembar	1219 Lembar		1500 Lembar		1500 Lembar		1.500 Lembar		1500 Lembar		72195 Lembar			
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar		2 Jenis	3 Macam	10,800,000	3 Macam	13,000,000	3 Macam	14,000,000	3 Macam	15,000,000	3 Macam	15,000,000	3 Macam	67,800,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		35 Dokumen	40 Dokumen	858,289,500	40 Dokumen	930,000,000	40 Dokumen	985,000,000	40 Dokumen	1,040,000,000	40 Dokumen	1,040,000,000	40 Dokumen	4,853,289,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten
				Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah		-	20 Dokumen													
				Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		686 Dokumen	686 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		3.686 Dokumen			
				Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah		5 Dokumen	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		100 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		-	7 Dokumen	19,500,000	7 Dokumen	26,000,000	7 Dokumen	27,000,000	7 Dokumen	28,000,000	7 Dokumen	28,000,000	7 Dokumen	128,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	3,143,750,000	100 Persen	9,700,000,000	100 Persen	5,300,000,000	100 Persen	8,300,000,000	100 Persen	5,900,000,000	100 Persen	32,343,750,000	Bidang Aset	Kab Bantul
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		3 Unit	1 Unit	3,021,000,000	15 Unit	8,500,000,000	15 Unit	4,000,000,000	20 Unit	6,900,000,000	20 Unit	4,500,000,000	20 Unit	26,921,000,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		4 Unit	6 Unit		7 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Camat)			-		17 Unit		-		-		-		-			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Pimpinan DPRD)			-		-		-		4 Unit		-		-			
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan		-	4 Jenis	122,750,000	14 Jenis	1,200,000,000	14 Jenis	1,300,000,000	14 Jenis	1,400,000,000	14 Jenis	1,400,000,000	14 Jenis	5,422,750,000	Subbid Perencanaan dan Optimali	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN		-	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen				
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	711,963,100	100 Persen	790,000,000	100 Persen	845,000,000	100 Persen	900,000,000	100 Persen	900,000,000	100 Persen	4,146,963,100	Sekretariat		
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		-	43529 Liter	631,613,100	44243 Liter	700,000,000	44243 Liter	750,000,000	44243 Liter	800,000,000	44243 Liter	800,000,000	44243 Liter	3,681,613,100	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten	
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		-	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit				
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		-	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit				
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2		63 Unit	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit				
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4		15 Unit	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	$[(\text{Anggaran belanja kesehatan} + \text{pendidikan} + \text{infrastruktur}) / \text{total APBD}] \times 100\%$		60 Persen	540,660,000	60 Persen	1,327,000,000	60 Persen	1,437,000,000	60 Persen	1,526,000,000	60 Persen	1,615,000,000	60 Persen	6,445,660,000	Bidang Anggaran	Kabupaten
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen	137,470,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	240,000,000	1 Dokumen	260,000,000	1 Dokumen	280,000,000	1 Dokumen	1,137,470,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Kabupaten
				Dokumen KUA PPAS Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA		204 Dokumen	204 Dokumen	21,010,000	204 Dokumen	72,000,000	204 Dokumen	80,000,000	204 Dokumen	86,000,000	204 Dokumen	92,000,000	204 Dokumen	351,010,000	Subbid Pengendalian Anggaran	Kabupaten
				Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati		192 Dokumen	192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen			
				Dokumen anggaran kas		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Dokumen SPD		-	450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen			
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	221,997,500	1 Raperbup	550,000,000	1 Raperbup	600,000,000	1 Raperbup	650,000,000	1 Raperbup	700,000,000	1 Raperbup	2,721,997,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Rancangan perda tentang APBD		1 Raperda	1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda				
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		1 Raperda	1 Raperda	153,942,500	1 Raperda	460,000,000	1 Raperda	490,000,000	1 Raperda	500,000,000	1 Raperda	510,000,000	1 Raperda	2,113,942,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kabupaten	
				Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup				
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	6,240,000	1 Raperbup	25,000,000	1 Raperbup	27,000,000	1 Raperbup	30,000,000	1 Raperbup	33,000,000	1 Raperbup	121,240,000	Subbid Pengendalian Anggaran	Kabupaten	
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan di atas target	(Jumlah OPD dengan penyerapan di atas target serapan APBD / jumlah OPD) x 100%	-	15 Persen	437,650,120	15 Persen	581,579,525	15 Persen	625,069,525	15 Persen	686,476,478	15 Persen	735,476,478	15 Persen	3,066,252,126	Bidang Perbendaharaan		
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Posisi Kas Harian/Aliran Kas		-	48 Laporan	41,900,000	48 Laporan	130,000,000	48 Laporan	140,000,000	48 Laporan	150,000,000	48 Laporan	160,000,000	48 Laporan	621,900,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten	
				Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		-	12 BA		12 BA		12 BA		12 BA		12 BA		12 BA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Keputusan SK Bupati tentang besaran UP		-	1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK			
				Keputusan SK Bupati tentang Pembukaan Rekening		-	1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK			
				Rekonsiliasi Rekening OPD		-	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer		12 Dokumen	12 Dokumen	14,475,000	12 Dokumen	22,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	28,000,000	12 Dokumen	32,000,000	12 Dokumen	121,475,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul
				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik		54 Dokumen	66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen			
				Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik		26 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen			
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Laporan pemanfaatan Idle Kas		-	12 Laporan	32,650,000	12 Laporan	64,900,000	12 Laporan	71,390,000	12 Laporan	78,529,000	12 Laporan	85,529,000	12 Laporan	332,998,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas																		
				Laporan TGR		-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan				
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D		-	6000 Dokumen	206,040,000	6000 Dokumen	204,000,000	6000 Dokumen	225,000,000	6000 Dokumen	250,000,000	6000 Dokumen	275,000,000	6000 Dokumen	1,160,040,000	Subbidang Belanja Daerah	Kabupaten	
				SK PA / KPA, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				
				Laporan DTH ke SIKD		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali				
				Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
				Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyeteroran pajak pusat ke RKUN		-	2 BA		2 BA		2 BA		2 BA		2 BA		2 BA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				SK BUD/Kuasa BUD, PPKD, TAPD		-	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen				
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		-	1 Dokumen	22,810,000	1 Dokumen	28,000,000	1 Dokumen	31,000,000	1 Dokumen	34,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	152,810,000	Subbid Belanja Daerah	Kab Bantul	
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja		-	3 Dokumen	119,775,120	3 Dokumen	132,679,525	3 Dokumen	132,679,525	3 Dokumen	145,947,478	3 Dokumen	145,947,478	3 Dokumen	677,029,126	Subbid Belanja Daerah	Kab Bantul	
				Laporan belanja pegawai ke SIKD		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
				Laporan verifikasi gaji		-	14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen				
				Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN		-	14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen				
				Penyusunan SPT Tahunan		-	8000 Form		8000 Form		8000 Form		8000 Form		8000 Form		8000 Form				
				Evaluasi penyerapan belanja OPD		-	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali				
				Rekonsiliasi belanja OPD		-	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pendampingan penatausahaan belanja daerah		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	(Realisasi SILPA /realisasi APBD) x 100%	-	9 Persen	414,000,120	9 Persen	565,000,000	9 Persen	623,000,000	9 Persen	681,000,000	9 Persen	749,000,000	9 Persen	3,032,000,120	Bidang Akuntansi	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi		12 Dokumen	12 Dokumen	32,068,632	12 Dokumen	80,000,000	12 Dokumen	90,000,000	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	422,068,632	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kabupaten
				Neraca Daerah akhir tahun		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Neraca SKPD Bulanan		672 Dokumen	672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen			
				Laporan Realisasi Anggaran		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	3,700,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	14,000,000	2 Dokumen	47,700,000	Subbid Pembukuan	Kabupaten
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja		4 Dokumen	4 Dokumen	6,800,000	4 Dokumen	18,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	22,000,000	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	90,800,000	Subbid Pembukuan	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD		4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen				
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	245,850,000	1 Raperbup	300,000,000	1 Raperbup	330,000,000	1 Raperbup	360,000,000	1 Raperbup	390,000,000	1 Raperbup	1,625,850,000	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul	
				Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1 Raperda	1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda				
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Raperbup	1 Raperbup	9,000,000	1 Raperbup	11,000,000	1 Raperbup	12,000,000	1 Raperbup	13,000,000	1 Raperbup	14,000,000	1 Raperbup	59,000,000	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				BKK Pedukuhan		-	933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan				
				BKK 75 Desa		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
				BKK P2MD		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
				BKK Pilurdes		-	1 Tahun		-		1 Tahun		-		1 Tahun		1 Tahun				
				BKK TMMD		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
				BKK Kompensasi TKD		-	-		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
				BKK Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima		-	-		3 desa		3 desa		3 desa		3 desa		3 desa				
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT		1 Kabupaten	1 Kabupaten	22,620,000,000	1 Kabupaten	6,009,840,635	1 Kabupaten	2,169,322,135	1 Kabupaten	6,974,357,182	1 Kabupaten	6,962,937,072	1 Kabupaten	44,736,457,024	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul	
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kotora	Penyaluran Bagi Hasil Pajak		75 Kalurahan	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	130,516,991,250	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul	
				Penyaluran Bagi Hasil Retribusi		75 Kalurahan	75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan				
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	(Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit) x 100%	100 Persen	100 Persen	1,262,739,710	100 Persen	1,470,000,000	100 Persen	1,542,000,000	100 Persen	2,114,000,000	100 Persen	1,692,000,000	100 Persen	8,080,739,710	Bidang Aset	Kab Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	(Jumlah OPD yang menyampaikan laporan BMD tepat waktu/jumlah OPD) x 100%	-	92 Persen	1,262,739,710	96 Persen	1,470,000,000	98 Persen	1,542,000,000	100 Persen	2,114,000,000	100 Persen	1,692,000,000	100 Persen	8,080,739,710	Bidang Aset	Kabupaten
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ		-	1 Dokumen	131,612,970	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	731,612,970	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD		60 Dokumen	60 Dokumen	12,310,000	60 Dokumen	14,000,000	60 Dokumen	15,000,000	60 Dokumen	16,000,000	60 Dokumen	17,000,000	60 Dokumen	74,310,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten
				Laporan RKPMD		60 Dokumen	60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen			
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD		-	1 Dokumen	64,275,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	374,275,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima		50 BAST	50 BAST	313,600,000	50 BAST	330,000,000	50 BAST	340,000,000	50 BAST	350,000,000	50 BAST	360,000,000	50 BAST	1,693,600,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			Milik daerah	
				Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)		2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	
				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)		2 SK	2 SK		2 SK		2 SK		2 SK		2 SK		2 SK		2 SK	
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	49,450,000	2 Dokumen	65,000,000	2 Dokumen	70,000,000	2 Dokumen	575,000,000	2 Dokumen	85,000,000	2 Dokumen	844,450,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
				Sensus BMD		-	-		-		-		1 Dokumen		-		-			
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB		1400 Buah	1400 Buah	3,000,000	1400 Buah	6,000,000	1400 Buah	7,000,000	1400 Buah	8,000,000	1400 Buah	10,000,000	1400 Buah	34,000,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Laporan pengelolaan IT Aset		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
				Laporan persediaan		480 Dokumen	480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah		58 Orang	58 Orang	73,729,000	58 Orang	170,000,000	58 Orang	180,000,000	58 Orang	190,000,000	58 Orang	200,000,000	58 Orang	813,729,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul	
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%	17 persen	21,69 persen		22,19 persen		22,69 persen		23,19 persen		23,69 persen		23,69 persen				
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	(Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%		100 Persen	10,302,989,220	100 Persen	12,193,391,500	100 Persen	12,827,418,000	100 Persen	13,430,197,000	100 Persen	14,082,037,110	100 Persen	62,836,032,830	Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1); Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	(Realisasi Pajak Daerah / Realisasi PAD) x 100%	-	40 Persen	10,302,989,220	42 Persen	12,193,391,500	44 Persen	12,827,418,000	46 Persen	13,430,197,000	46 Persen	14,082,037,110	46 Persen	62,836,032,830	Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1); Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)	
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah		2 Laporan	2 Laporan	62,575,000	2 Laporan	74,980,000	2 Laporan	82,480,000	2 Laporan	90,730,000	2 Laporan	98,730,000	2 Laporan	409,495,000	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah		4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan			
				Reviu Perbup Pajak Daerah		-	10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup	10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		
				Reviu SOP Pajak Daerah		-	70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen	70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		
				Reviu Perda Pajak Daerah		-	1 Perda		-		1 Perda		-	1 Perda		1 Perda		1 Perda		
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Collecting Ratio Pajak PBB-P2		-	78 Persen	2,232,976,920	80 Persen	2,732,699,000	82 Persen	2,885,969,000	84 Persen	2,988,566,000	84 Persen	3,088,566,000	84 Persen	13,928,776,920	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara		-	1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set				
				Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara		-	-		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi				
				Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah		-	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
				Aplikasi SmartGov Terpelihara		-	2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah		100 WP	110 WP	22,932,500	121 WP	25,225,750	133 WP	27,748,325	146 WP	30,523,150	146 WP	30,523,150	146 WP	136,952,875	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kabupaten	
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak		3 Jenis	-	376,585,600	-	508,852,350	-	516,329,775	-	523,554,950	-	528,554,950	-	2,453,877,625	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kabupaten	
				Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendaftaran PBB		4 Kalurahan	4 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan				
				Updating data objek PBB-P2		-	3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		30000 Objek Pajak				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Laporan Pemeliharaan Basis Data PBB		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual		40 Objek Pajak	6 Objek Pajak	11,790,000	8 Objek Pajak	49,985,000	10 Objek Pajak	54,985,000	12 Objek Pajak	59,985,000	12 Objek Pajak	64,985,000	12 Objek Pajak	241,730,000	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kab. Bantul	
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penerbitan SKPD Pajak Daerah		-	3718 SKPD	2,815,160,000	3725 SKPD	2,220,767,700	3730 SKPD	2,230,767,700	3750 SKPD	2,240,767,700	3800 SKPD	2,282,685,510	3800 SKPD	11,790,148,610	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kab. Bantul	
				Penetapan Wajib Pajak Baru		50 WP	110 WP		121 WP		133 WP		146 WP		146 WP		146 WP				
				Penetapan SPPT PBB		-	638000 Lembar		641000 Lembar		644000 Lembar		647000 Lembar		647000 Lembar		647000 Lembar				
				Penyampaian SKPD Pajak Daerah		-	3718 SKPD		3725 SKPD		3730 SKPD		3750 SKPD		3800 SKPD		3800 SKPD				
				Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan		-	1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		
				Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	561,163,980	12 Dokumen	1,644,133,160	12 Dokumen	1,654,133,160	12 Dokumen	1,664,133,160	12 Dokumen	1,664,133,160	12 Dokumen	7,187,696,620	Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Pelayanan Pajak Daerah		11 Jenis Pajak	3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas			
				Penelitian Permohonan Pelayanan		-	2 Jenis		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas			
				Penerbitan Kartu NPWPD		-	110 Lembar		110 Lembar		121 Lembar		133 Lembar		133 Lembar		133 Lembar			
				Sosialisasi Pajak Daerah		-	1620 Orang		1782 Orang		1960 Orang		2156 Orang		2156 Orang		2156 Orang			
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi		12 Dokumen	12 Dokumen	267,614,040	12 Dokumen	191,714,040	12 Dokumen	201,714,040	12 Dokumen	211,714,040	12 Dokumen	221,714,040	12 Dokumen	1,094,470,200	Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah		-	11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen			
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah		350000 Dokumen	350000 Dokumen	1,476,425,340	350000 Dokumen	1,895,000,000	350000 Dokumen	2,045,000,000	350000 Dokumen	2,195,000,000	350000 Dokumen	2,345,000,000	350000 Dokumen	9,956,425,340	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
				Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah		-	5 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		
				Persentase realisasi pajak daerah		-	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai		-	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		
				Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah		1 Set	1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan		-	11 Jenis Pajak	16,400,000	11 Jenis Pajak	25,000,000	11 Jenis Pajak	27,000,000	11 Jenis Pajak	30,000,000	11 Jenis Pajak	33,000,000	11 Jenis Pajak	131,400,000	Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab. Bantul	
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB		12 Dokumen	12 Dokumen	426,035,840	12 Dokumen	500,000,000	12 Dokumen	550,000,000	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	650,000,000	12 Dokumen	2,726,035,840	Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapa	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			tan Daerah (PP2)	
				Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah		-	11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen			
				Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT		-	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang			
				Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali			
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Laporan	2 Dokumen	38,280,000	2 Dokumen	54,546,000	2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	66,000,000	2 Dokumen	72,000,000	2 Dokumen	290,826,000	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
				Terselenggaraany Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		11 OPD	11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD			
								406.674.367.399		411.639.022.000		413.285.921.000		412.802.081.000		417.322.420.000		2.061.723.811.399		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan BPKPAD dalam kurung waktu 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Program Prioritas BPKPAD Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Kompensasi TKD	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.	Mobil Camat	-	5.000.000.000	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Mobil Pimpinan DPRD	-	-	-	2.400.000.000	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.	Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	n/a	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.1.2	Indikator Kegiatan								
	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	n/a	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	
	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	n/a	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	
	Persentase SILPA terhadap APBD	n/a	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	n/a	92 Persen	96 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2	Indikator Sasaran PD 2								
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 %	21,69 %	22,19 %	22,69 %	23,19 %	23,69 %	23,69 %	
1.2.1	Indikator Program								
	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2.2	Indikator Kegiatan								
	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	n/a	40 Persen	42 Persen	44 Persen	46 Persen	46 Persen	46 Persen	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, selain itu juga merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....